



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 9
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Agama Republik Indonesia
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 23 November 2020
Waktu : Pukul 10.28-12.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung
Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot
Soebroto, PT 10270
- Acara** : 1. Laporan keuangan Penyelenggaraan
Ibadah Haji tahun 1441H/2020 M.
2. Pembicaraan Persiapan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1442H /2021M.
- Ketua Rapat** : H. M. Ihsan Yunus, M.E., Con. Std.
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
(Kabang Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 38 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII
DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**
1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. H. M. Ihsan Yunus, M.E. Con. Std.
(F-PDI Perjuangan)
3. DR. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-
Partai Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
ANGGOTA:
FRAKSI PDI PERJUANGAN
6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Inna Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.

15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
19. Mohammad Saleh, SE.
20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidaj Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr.h. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. H. Sungkono
50. M. Ali Taher

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. lip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

**Anggota Izin
Undangan**

- : 12 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
- : Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. M. IHSAN YUNUS, M.E., Con. Std.):

Bissmillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Mengawali rapat kerja kita pada pagi hari ini marilah sesuai dengan kebiasaan baik kita di Komisi VIII, kita membaca do'a dulu seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Bagi yang muslim kami persilakan untuk membaca ummul kitab surat Al Fatihah, dan bagi yang beragama lain dipersilakan berdo'a sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Hadirin yang terhormat.

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2020 – 2021 dan juga telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 dan juga keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 10 November 2020 maka pada hari ini Senin, 23 November 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda, Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi dan Pembicaraan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

Menurut laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI rapat kerja kali ini telah hadir secara fisik 8 orang Anggota, dan virtual 23 orang Anggota ada izin 10 orang Anggota mungkin masih di Dapil pak Menteri, karena ini sudah mulai dekat-dekat dengan Pilkada. Oleh karena itu sudah lebih atau kuorum dari 51 Anggota Komisi VIII, hal ini berarti rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah fraksi dan Anggota Komisi VIII. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai, atas persetujuan saudara Menteri Agama Republik Indonesia dan rekan-rekan Pimpinan dan juga Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat kerja ini kami buka dan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL. 10.28 WIB

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan acara rapat kerja pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan saudara Menteri Agama Republik Indonesia mengenai Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441

Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dan Pembicaraan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi.

3. Tanya jawab;
4. Kesimpulan rapat; dan
5. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya rapat kerja hari ini kita akan akhiri pada pukul 12.00 WIB cukup? 12.00 WIB ya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan beberapa poin pokok dalam pengantar rapat ini saya akan memperkenalkan Anggota Komisi VIII DPR RI yang baru, hadir? Oh karena izin tadi, tapi tetap saya perkenalkan ada namanya bapak Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P. dari Fraksi Nasdem Dapil Sumut III yang menggantikan bapak H. Satori, ya pak Satorinya sudah pindah ke komisi lain.

Dalam rangka menyambut musim haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia akan membahas laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi dan pembicaraan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia pak Menteri, banyak sekali pertanyaan, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memberikan sedikit titik cerah kepada saudara-saudara kita yang akan naik haji.

Komisi VIII DPR RI bermaksud ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sebagaimana amanat dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang menyebutkan bahwa menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji kepada Presiden dan DPR RI, paling lama 60 hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji. Karena tahun 2020 ini tidak dapat diselenggarakan, disebabkan oleh Covid-19, maka Komisi VIII DPR RI memandang laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji harus tetap disampaikan. Untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan haji untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang telah

dibatalkan dialokasikan untuk komponen-komponen apa saja, serta bagaimana kebijakan atas komponen yang telah dibelanjakan tersebut?

Setelah laporan keuangan haji Komisi VIII DPR RI juga ingin mendengarkan penjelasan dari saudara Menteri Agama Republik Indonesia, tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Sebagai langkah awal Komisi VIII DPR RI dan pemerintah dalam memutuskan kebijakan mengenai pembentukan panitia kerja BPIH, (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Pembahasan rutin BPIH umumnya setelah laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji adalah rapat pembicaraan pendahuluan BPIH tahun berjalan. Namun dikarenakan tahun ini kondisi dunia termasuk Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi masih dalam pandemi Covid-19 maka Komisi VIII DPR RI memandang perlunya rapat pembicaraan persiapan penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu.

Sebelum kita memulai pembicaraan pendahuluan dan pembentukan Panitia BPIH, pada rapat pembicaraan persiapan ini Komisi VIII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan mengenai kondisi terkini kebijakan Arab Saudi khususnya mengenai alokasi kuota haji untuk Indonesia, kondisi objektif di Arab Saudi, serta berbagai hal lainnya yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Kerajaan Saudi Arabia. Komisi VIII juga memperoleh informasi bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengutus tim ke Arab Saudi beberapa waktu yang lalu terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Kami dengar memang pak Nizar pak Sekjen, pak Plt Dirjen Pak Oman, terus pak siapa lagi itu? Oh iya pak Alfi sudah alhamdulillah pergi kesana, dan pulang *negative* semua. Sehingga Komisi VIII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan apa saja hasil dari kunjungan tersebut kaitannya dengan berbagai aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Pada rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 18 November 2020 Menteri Agama Republik Indonesia telah menyampaikan juga sekilas mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan bahkan usulan mengenai skema BPIH dengan menerangkan tidak perlu melakukan penambahan besaran BPIH tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Jika terdapat kekurangan BPIH disarankan ditutup dari nilai manfaat yang diperoleh dari jamaah haji dalam kurun waktu satu tahun menunggu.

Komisi VIII DPR RI memandang usulan pada rapat kerja yang lalu belum waktunya untuk diajukan besaran BPIH yang berasal dari BPIH dan nilai manfaat keuangan haji, akan dibahas secara khusus pada panitia kerja BPIH yang akan dibentuk kemudian. Tidak lupa kami juga akan menimbang dan melihat serta meneliti hasil dari rekomendasi Panja ODH (Optimalisasi Dana Haji) yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan ke belakang dan dalam waktu dekat ini akan segera di-*publish* atau disimpulkan rekomendasi, termasuk di dalamnya skema pembiayaan BPIH maupun BPIH, kalau perlu kita sepakati sampai 20 – 30 tahun ke depan dalam rangka memenuhi konsep *istitho'ah*, ini pak Oman yang selalu mengingatkan masalah *istitho'ah* atau kemampuan baik itu kemampuan dalam membiayai perjalanan ibadah haji, kemampuan memberikan penghidupan kepada mereka yang ditinggalkan di

Indonesia, maupun kemampuan kesehatan, kemampuan syari'ah juga yang paling penting dan juga kemampuan keamanan.

Komisi VIII sangat mengharapkan semua agar pada hari ini kita dapat merumuskan kebijakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi meskipun terdapat tantangan yang berat karena pandemi Covid-19 sampai saat ini belum berakhir.

Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati.

Demikianlah pengantara yang dapat kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami mempersilakan kepada Saudara Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas *taufiq*, rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI, dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dengan kondisi sehat wal'afiat.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama khususnya penyelenggaraan ibadah haji.

Selanjutnya sesuai agenda rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Penjelasan atas laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dapat dilaporkan sebagai berikut.

- a. Laporan Pertanggungjawab Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Laporan pertanggungjawab keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah, tahun 2020

Masehi disusun dan disajikan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagian ke lima tentang evaluasi dan pelaporan Pasal 51 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji kepada Presiden dan DPR RI, paling lama 60 hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji.

Laporan pertanggungjawab keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji mempertanggungjawabkan tentang, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) yang bersumber dari BIPIH, nilai manfaat, dana efisiensi dan sumber lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bagian ke empat tentang BPIH Pasal 44 bahwa BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH, Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nilai manfaat, dana efisiensi dan/atau sumber lain yang sah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi tidak terdapat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020, namun Kementerian Agama tetap mengelola keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah, yang ditransfer oleh BPKH untuk pengadaan gelang jamaah haji dan percetakan buku manasik haji sebagaimana yang telah disetujui oleh DPR dalam rapat kerja tanggal 7 Juli 2020.

Di dalam kesimpulan hasil rapat tersebut, alokasi anggaran BPIH tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi yang disetujui DPR sebesar Rp.7.194.288.838.000,- Oh mohon maaf Rp.7.194.288.838,-.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji Pasal 19 ayat (1) bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPKOPIH) terdiri atas:

1. Laporan realisasi anggaran;
2. Laporan penerimaan dan pengeluaran; dan
3. Catatan lain.

Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai bagian dari proses persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Untuk itu dalam rapat kerja ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban

keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, posisi per 31 Agustus 2020.

Adapun penjelasan dari ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai berikut:

1. Tentang laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.6.455.294.838,-. Atau 89,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.194.288.838,-. Alokasi anggaran tersebut berasal dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah.

Realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji regular yaitu untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji dan pembayaran biaya pencetakan buku manasik haji yang akan digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya sebesar Rp.5.939.876.998,- atau (89,73%) dari anggaran sebesar Rp.6.619.779.078,-. Dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji dan pembayaran biaya pencetakan buku manasik haji yaitu sebesar Rp.515.387.840,- atau (89,71%) dari anggaran sebesar Rp.574.509.760,-. Sisa sebesar Rp.739.024.000,- merupakan sisa pembayaran pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji regular dan khusus sebesar Rp.20% yang akan dibayarkan pada saat pengadaan gelang telah selesai 100% yaitu untuk pencetakan nama dan identitas jamaah haji.

Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi per 31 Agustus 2020 disajikan sebagai berikut:

Anggaran sebesar Rp.7.194.288.838,-

Realisasinya sebesar Rp.6.455.294.638,- atau (89,73%).

- a) Beban nilai manfaat BPIH regular anggarannya Rp.6.619.779.078,- realisasinya Rp.5.939.876.998,- atau (89,73%).

- 1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi belum terlaksana karena ibadah haji tidak jadi dilaksanakan atau tidak diberangkatkan.
- 2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri anggarannya Rp.6.619.779.078,- realisasinya sebesar Rp.5.939.876.998,- atau (89,73%). Ini dipakai untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji yang disiapkan anggarannya Rp.3.399.510.400,-

realisasinya Rp.2.719.608.320,- atau (80%). Sedangkan cetak buku haji anggarannya disiapkan Rp.3.220.268.678,- realisasinya sama semua terpakai semua (100%).

- b) Beban nilai manfaat BPIH khusus, anggaran yang disiapkan sebesar Rp.574.509.760,- realisasinya Rp.515.387.840,- atau (89,71%). Penggunaannya pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji khusus anggarannya Rp.295.609.600,- realisasinya Rp.238.487.680,- atau (80%). Sedangkan cetak buku manasik haji khusus anggaran yang disiapkan Rp.278.900.160,- terpakai realisasinya (100%) Rp.278.900.160,-.

2. Tentang laporan penerimaan dan pengeluaran.

Laporan penerimaan dan pengeluaran adalah merupakan laporan yang menggambarkan jumlah dana yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji selama masa operasional haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi untuk posisi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut bukan hanya berasal dari anggaran yang diterima dari BPKH, tetapi juga meliputi penerimaan yang berasal dari sumber lain yang diterima selama tahun 2020 seperti imbal hasil, rekening giro operasional.

Dalam penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran diakui berdasarkan basis kas yaitu diakui pada saat diperolehnya penerimaan dan saat dikeluarkannya pengeluaran secara riil.

- a) Penerimaan jumlah penerimaan dana sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.8.287.809.982,26,-. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan nilai manfaat BPIH regular sebesar Rp.6.619.779.078,- penerimaan nilai manfaat BPIH khusus sebesar Rp.574.509.760,- serta penerimaan lain sebesar Rp.1.093.521.144,26,- yang berasal dari penerimaan imbal hasil rekening giro.
- b) Pengeluaran jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.6.666.524.168,82,- yang terdiri dari beban nilai manfaat BPIH regular sebesar Rp.5.939.876.998,- dan beban nilai manfaat BPIH khusus sebesar Rp.515.387.840,- serta beban lainnya yaitu pembayaran pajak jasa giro, dan biaya administrasi rekening giro yang dipotong langsung oleh bank sebesar Rp.211.259.330,82,-
- c) Tentang saldo akhir jumlah saldo akhir sebesar Rp.1.621.285.813,45,- merupakan selisih antara jumlah penerimaan yang telah disampaikan tadi dan pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

Ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi per 31 Agustus 2020 disajikan pada sebagai tabel berikut.

Penerimaan sebesar Rp.8.287.809.982,26,- setelah dialihkan ke asalnya penerimaan dari nilai manfaat BPIH regular, nilai manfaat BPIH khusus dan sumber lain yang sah.

Pengeluaran jumlah Rp.6.666.524.168,82,- yang dikeluarkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu untuk beban nilai manfaat BPIH sebesar Rp.593.987.762,98,- beban nilai manfaat BPIH khusus Rp.515.387.840,- sedangkan beban lainnya Rp.211.259.330,82,- sehingga saldo akhir sebagaimana telah disampaikan sebelumnya sebesar Rp.1.621.285.813,45.

3. Tentang catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan.

Catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan (CALPK) LPKOPIH tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi per 31 Agustus 2020 *un updated* merupakan daftar hukum profil kebijakan teknis, pendekatan, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Di samping itu dalam CALPK tersebut juga dikemukakan penjelasan atas pos-pos laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

b. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, dan
Hadirin yang berbahagia.

Terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Tentang kuota haji.

Berdasarkan hasil MoU untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Republik Indonesia sebanyak 221.000 jamaah. Kuota tersebut dibagi menjadi dua yaitu untuk jamaah haji regular sebanyak 203.320 jamaah, dan untuk jamaah haji khusus sebanyak 17.680 jamaah.

Untuk saat ini pemerintah Indonesia belum mendapatkan kuota haji untuk pemberangkatan haji tahun 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Pada saat beberapa hari yang lalu pak Nizar dan Pak Oman kesana pada saat ditanyakan jawaban mereka masih terlalu dini untuk berbicara tentang itu. Nanti tidak ada salahnya selesai laporan ini Pak

Nizar maupun pak Oman kalau ada yang akan ditambahkan laporan nanti tolong ditambahkan.

- 1) Jamaah haji pemberangkatan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi.

Jamaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi adalah jamaah haji yang berhak berangkat dan telah melunasi BIPIH, pada rencana penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, serta belum melakukan pembatalan hajinya.

- 2) Skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi.

Mengingat sampai dengan saat ini pandemi wabah Covid-19 belum berakhir maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dengan tiga opsi sebagai berikut:

- a) Kuota penuh, jika kuota sudah diperoleh serta wabah telah berlalu atau vaksin Covid-19 telah tersedia.
- b) Kuota terbatas, jika kuota sudah diperoleh dan wabah masih berlanjut namun kebijakan pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
- c) Tidak memberangkatkan jamaah haji jika kebijakan pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan ibadah haji hanya untuk lingkup terbatas.

Pemerintah sampai saat ini telah bekerja untuk menyiapkan opsi pertama kuota penuh, serta terus mengikuti perkembangan agar dapat memperkirakan opsi yang memiliki peluang paling tinggi, kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Masalah pengadaan penerbangan, maskapai yang telah ditetapkan sebagai penyedia transportasi udara pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi akan ditetapkan kembali sebagai penyedia transportasi udara pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji.
- 4) Pengadaan pelayanan di Arab Saudi, untuk pengadaan pelayanan di Arab Saudi yang telah ditetapkan sebagai penyedia layanan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi akan ditetapkan kembali sebagai penyedia layanan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi berupa pengenaan pajak sebesar 15% kondisi tersebut perlu disikapi karena akan berdampak pada kenaikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi dan peninjauan kepada pihak-pihak terkait di Arab Saudi terhadap dampak Covid-19 dan kenaikan pajak atas layanan di Arab Saudi.

- 5) Tentang pengadaan gelang dan buku manasik haji, meskipun pada musim haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi tidak ada pemberangkatan jamaah haji, namun terdapat realisasi biaya operasional haji berupa, pengadaan gelang jamaah haji dan buku manasik jamaah haji. Gelang dan buku manasik tersebut rencananya tetap akan dibagikan kepada jamaah haji untuk pemberangkatan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Sedangkan dalam anggaran operasional haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi akan dianggarkan dana untuk pengadaan gelang dan buku manasik yang diperuntukkan bagi jamaah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Karena pengalaman selama ini sangat terlalu panjang pengurusannya sehingga takut akan terlambat. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan hikmah dan menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi, yaitu adanya keterlambatan pengadaan dan pengiriman buku manasik.
- 6) Anggaran operasional haji, dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi saat ini sedang disusun anggaran operasional haji yang dalam waktu dekat sesuai ketentuan akan segera diusulkan kepada yang terhormat Komisi VIII DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati; dan

Hadirin yang berbahagia.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Sebelum kami tutup kami sampaikan laporan tambahan bahwa yang lalu telah kami laporkan umrah yang pertama telah dilakukan tanggal 1 November 2020, kedua tanggal 3 November 2020 kemudian ketiga tanggal 8 November 2020 dan alhamdulillah yang keempat telah juga berlangsung pada tanggal 22 November 2020 beberapa hari yang lalu.

Jamaah yang siap berangkat 74, tapi dua di antaranya terkena positif Covid-19 sehingga yang berangkat 72 orang jamaah. Alhamdulillah positif Covid-19nya ketahuannya sebelum berangkat, sehingga tidak perlu ada karantina di Saudi Arabia. Nanti setelah kami tutup mohon berkenan mungkin

akan ada tambahan dari pak Oman dan pak Nizar, karena tadi Pimpinan mengharapkan ada masukan tambahan dari hasil kunjungan kerja beliau berdua ini ke Saudi Arabia beberapa hari yang lalu.

Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah. semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Atas izin Pimpinan mungkin berkenan untuk menambahkan teman-teman.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak. Laporan langsung ini dari Saudi Arabia.

DIRJEN KEMENAG (OMAN FATHURAHMAN):

Terima kasih mohon izin Pak Menteri.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua dan Wakil Pimpinan Komisi VIII DPR RI serta para Anggota yang kami hormati.

Mungkin tambahannya sedikit saja yang terkait dengan haji, jadi ketika kami tanggal 9 November lalu melakukan pengawasan umroh kami sekalian juga bertemu dengan otoritas Kementerian Haji dan Umroh pada saat itu dengan semacam Asdep Umrohnya barangkali ya, kami menyampaikan beberapa hal terkait umroh, lalu ada dua hal yang kami sampaikan, kami tanyakan terkait dengan haji. Yang pertama terkait dengan *Degree* praja itu kan kalau umroh itu dibatasi usia 18 tahun sampai 50 tahun, nah kami untuk memitigasi haji tahun 2021 kami tanyakan, apakah ada proyeksi kemungkinan pembatasan ini berlaku juga untuk haji? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua tentu kami juga bertanya terkait kuota, karena seharusnya kan akhir November atau awal Desember itu sudah MoU, maka kami juga bertanya terkait kemungkinan kuota, karena kami di Kementerian Agama atas arahan bapak Menteri tentu membutuhkan upaya mitigatif supaya semuanya bisa terencana. Nah jawabannya satu saja dari otoritas haji ini, Mazala mubaqhiron, jadi semuanya terlalu dini, hanya itu saja sambil geleng-geleng kepala. Jadi itu saja yang dapat kami tambahkan, belum ada informasi terkait itu. Terutama yang pertama barangkali penting karena di masyarakat itu ada beredar bahwa untuk haji juga akan dibatasi usia 50 tahun, ini sama sekali tidak benar, karena belum ada informasi resmi sama sekali dari otoritas Arab Saudi.

Terima kasih pak Menteri, Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta para Anggota yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Silakan pak Sekjen. Ini pergi juga ya kemarin ya?

SEKJEN KEMENAG (NIZAR):

Baik atas seizin Pak Menteri, iya Pak kami sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, teman-teman Anggota Komisi VIII.

Sedikit saja tadi sudah disampaikan oleh pak Oman cuma ada satu terkait bahwa sebenarnya pemerintah Arab Saudi ini punya perhatian yang khusus terhadap Indonesia. Ini terbukti dari pembukaan umroh itu sebenarnya hanya untuk dua negara yakni Indonesia dan Pakistan di tanggal 1 November 2020, ya ini catatan penting karena negara lain belum diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi, ini artinya prediksi kita juga haji tentu akan menjadi perhatian kita bersama.

Yang kedua perkembangan tadi ditanya bagaimana perkembangan terkini, bahwa di Arab Saudi sudah mengembangkan uji coba vaksin Covid-19 dan 94 berhasil. Karena itu kemudian nanti diharapkan nanti ada komunikasi antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia terkait dengan vaksin yang di-*recomendate*. Saya khawatir nanti kalau vaksinnya yang sudah diuji cobakan dan berhasil per waktu kami pulang itu 94% berhasil, nanti beda dengan jenis vaksin yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kalau sudah ditemukan nanti uji klinis yang keempat ini berhasil, maka kemudian ya rekomendasinya ya sesuai dengan apa yang direkomendasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dan itu segera mungkin izin pak Menteri mohon pak Menteri mengusulkan kepada Komisi VIII untuk dan juga ke Kementerian Kesehatan untuk ya vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi supaya disediakan untuk jamaah haji sejumlah 221.000 itu. Sehingga kalau itu terjadi mungkin skema kita, maka kita dalam menyusun ini ada skema penuh, karena itu asumsinya 94% vaksin sudah berhasil. Saya rasa itu tambahan pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Sekjen. Baik ibu, bapak yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan oleh pak Menteri maupun pak Sekjen dan pak Dirjen tentang *up date* terakhir dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh.

Selanjutnya sesi tanggapan dan pertanyaan dari para Anggota Komisi VIII, dari fisik ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, oke sementara saya ambil dulu dari yang hadir fisik sayap kanan, ini tadi lupa pak Menteri ini pak Rudi

Hartono Bangun sudah hadir, beliau menggantikan bapak haji Satori, SPDLN. Silakan pak Rudi yang pertama dari fraksi Nasdem.

F- P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, M.E., S.A.P.):

Baik terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.
Yang saya hormati pak Menteri Agama Republik Indonesia.
Yang saya hormati pak Sekjen, pak Dirjen, Direktur dan seluruh jajaran yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu mohon maaf saya pak.

Pak Menteri yang saya hormati, saya hanya ingin bertanya ini mungkin karena saya baru, jadi pertanyaannya yang masih awam. Saya dari Komisi XI sebelumnya yang membidangi keuangan negara, jadi saya dipindah dulu ke sini mau melihat mungkin keuangan Kementerian Agama ini pak. Pak Menteri pertama inikan Kementerian Haji yang bertanggungjawab tentang pelaksanaan haji pemberangkatan dan lainnya. Saya ingin bertanya mengapa tahun ini 2020 Masehi atau 1441 Hijriah ini, tidak, kita tidak ada pemberangkatan atau tidak diperbolehkan gitu, sementara sebagai pembanding umroh tadi pak Menteri bilang diperbolehkan, dengan jumlah atau kuota manusianya mungkin lebih sedikit. Jadi apakah tidak ada upaya *me-lobby*, bermohon atau komunikasi? Seperti pak Dirjen apa tadi yang kesana katanya langsung, minimal tidak cerita 200.000 kuotanya mungkin 20.000 atau mungkin 8.000, atau mungkin 5.000 pak. Kenapa tidak berupaya seperti itu begitu?

Karena tadi saya dengar bapak bilang umroh diperbolehkan, tapi yang tidak mengenakan saya dengar dari berita ada beberapa 13 atau 15 orang jamaah kita umroh kita pak kena Covid-19, betul ya pak? Gitu jadi itu seperti apa menutup-nutupi ketika diperiksa disini akhirnya lolos disana tidak bisa ditutupi gitu. Itu akan menjadi *paradigm* bahwasannya tim kesehatan kita bermain-main pak di Indonesia ini, akhirnya bisa kerajaan Saudi itu tidak percaya begitu pak. Nah itu penilaian saya, gitu jadi saya bermohon menyampaikan ini kepada pak Menteri, pak Dirjen, Sekjen dan jajaran yang menanganinya janganlah bermain-main dengan program atau pemberangkatan jamaah ini pak, begitu. Itu yang pertama pak.

Yang kedua, tadi saya dari satu lembaran buku *paper* yang bapak baca saya menangkap substansi rapat ini ataupun nilai rapat ini mengenai gelang saya dengar pak. Nah gelang ini saya dengar bolak-balik gelang haji, gelang, gelang gitu, inikan rapat setingkat menteri pak harusnya ini saran saya pak, hanya urusan gelang sekali saja disebut pak dan itu direktur pak. Karena cakupan pak Menteri ini besar kinerjanya pak gitu, saya lihat hanya *ngurusi* gelang 5 berapa? Rp.5 miliar untuk dana yang tidak pasnya pak, gelang ini tidak dipakai untuk tahun ini begitu, tahun yang akan datang, itu juga kalau jadi pak, karena belum ada upaya *lobby* tadi pak begitu. Nah itu yang saya maksud ini maaf ya apakah cerita gelang ini hanya untuk nanti fendor supaya bekerja, terus kita bahas disini pak untuk proyek kan tidak pantas pak, pak Direktur saja itu yang ngurusi pak.

Saran saya pak Menteri ini, bapak sudah Menteri besar skalanya gitu, itu pak Menteri dan jajaran saya inti-inti saja kalau saya bedah inti anggarannya ini penerimaan pengeluaran sebenarnya bisa banyak, tapi nanti buat pusing disini pak. Itu saya pikir pak Menteri dan jajaran saya kembalikan ke Pimpinan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat bapak Dr. oh Dr. juga ini bapak ini ya, Dr. H. Jefry Romdoni, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. dari Fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak Jefry.

F- P GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONI, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun virtual, dan juga

Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Sekjen beserta jajarannya.

Saya mungkin fokus ke laporan keuangan tadi yang sudah disampaikan, jadi ini saya melihat ada penerimaan dan pengeluaran operasional haji tahun 2020, dan di situ disebutkan ada sumber lainnya pada penerimaan sebesar kurang lebih Rp.1 triliun. Jadi ini saya mohon penjelasan sumber lain ini apa yang dimaksud disini?

Kemudian disisi pengeluaran ini ada pos beban operasional haji regular sebesar Rp.5,9 triliun dan beban operasional haji khusus sebesar Rp.500 miliar. Ini mungkin juga perlu penjelasan, karena haji tahun 2020 ini tidak terlaksana, jadi bagaimana nasib dana tersebut dan juga mohon penjelasan mengenai beban lainnya yang sebesar Rp.200 miliar? Kemudian tadi saya menyimak juga laporan dari pak Dirjen, pak Oman tadi mengenai kata-kata *Mazalamubaqhiron* gitu ya, terlalu pagi ya Pak? Saya rasa mungkin komunikasinya harus tetap intens supaya kita mungkin bisa menentukan lebih awal gitu ya mengenai scenario yang akan digunakan nanti. Ya mungkin kata-kata *mazalamubaqhiron* ini ya masih mikir-mikir barangkali ya, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Pak Jefry ini salah satu kuliahnya ahli tafsir dan Bahasa Arab, jadi kalau tadi dikatakan pak Oman apa? *Mazalamubaqhiron* katanya itu mungkin interpretasinya macam-macam ya, iya saya kira jawabannya, *maafimusqhila*, ternyata *mazalamubaqhiron*.

Silakan yang terhormat bapak nama panjangnya saya harus tahu, iya H. Jhon Kennedy Azis, S.H., M.H. dari Sumbar II silakan.

F- PG (H. JHON KENNEDY AZIS, S.H.):

Saya belum doktor, Pak.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, para Dirjen barangkali ya, para Direktur di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati.

Saya pagi ini teduh betul saya rapat begitu, saya lihat duetnya pak Menteri sama pak Sekjen ini pas betul gitu. Mudah-mudahan ini membawa suatu angin segar untuk Komisi VIII. Pak Menteri saya menyimak secara jelas paparan pak Menteri, berkaitan tentang apa namanya tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Bagi saya secara pribadi bahwa ada yang telah terjadi dan apa yang telah diputuskan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, ini adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat artinya penting buat kita semua. Baik itu untuk hubungan selanjutnya antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama, maupun apa yang akan kita lakukan nanti terhadap rencana haji tahun 2021 yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang selama menjadi perdebatan kita tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 tidak akan terjadi lagi di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Pak Menteri ada yang beberapa menjadi catatan saya terhadap laporan keuangan itu, pertama tadi memang betul apa yang disampaikan pak Budi, bahwa sepertinya sentralnya laporannya pak Menteri hanya berkisar antara tentang gelang dan buku manasik haji saja gitu kan kira-kira. Tetapi saya mengambil suatu pemikiran bahwa, kan ibadah haji tahun 2020 saya membuat pertanyaan kepada pak Menteri, kan tidak jadi dilaksanakan, sementara kita sudah terlanjur memesan gelang dan buku manasik haji itu, pertanyaan pertama saya apakah gelang itu sudah di *delivery*, buku itu sudah di *delivery* belum ke jamaah? Kalau seumpamanya belum, kalau seumpamanya belum barangkali inikan merupakan celengan kita pak Menteri, bisa kita manfaatkan untuk jamaah tahun 2021, baik gelang maupun buku manasik hajinya.

Terus yang kedua adalah bahwa kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini berakhir, tidak ada yang bisa menebak, atau mereka sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir? Apakah dengan adanya vaksin yang *insyaallah* sekitar bulan Januari, Februari, Maret sudah beredar di Indonesia itu juga bisa artinya menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini atau tidak? Tentu dalam konteks ini kita harus berpikir pahit, kita harus berpikir mengandai-andai kalau tidak. Kalau seumpamanya tidak, tentu yang akan terjadi nanti pada waktu penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 adalah idem, adalah sama dengan tahun 2020.

Saya berkenaan dengan itu saya maunya Kementerian Agama dengan Komisi VIII khususnya Panja harus betul-betul seiring sejalan. Ya harus betul-betul kita ini kompak, artinya segala sesuatu kita putuskan secara bersama. Nah kalau seumpamanya memang tidak, pikiran pahit kita langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama, pak Menteri beserta jajaran? Berarti ini sudah dua kali tertunda, ini kita berbicara tidak ya, amit-amit itukan, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan dilancarkan Allah SWT. Tapi kalau tidak, kita harus berpikir juga kalau seumpamanya tidak, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh bapak Menteri?

Yang ketiga adalah berkenaan dengan uang-uang atau biaya-biaya barangkali yang sudah menjadi *down payment* apakah itu ke pengangkutan, bandara, apa sudah apa pesawat, transportasi, *catering*, hotel dan lain sebagai macamnya, apakah pada waktu tahun 2020 itu sudah dibayar? Kalau sudah dibayar, bagaimana kondisi keuangan kita? Sebab di delapan, saya mungkin berpikir ini belum dilakukan pembayaran, sebab kalau sudah dilakukan pembayaran pasti ada di laporan pak Menteri ini gitu. Tetapi saya memang tidak melihat itu tidak dilaporkan, tapi saya ingin suatu ketegasan, sebab tidak disinggung di dalam ini. Seharusnya kalau seumpamanya itu tidak dilakukan pembayaran hal-hal yang tidak termasuk di dalam laporan ini berarti belum dilakukan pembayaran atau belum dilaksanakan.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pak Ketua, terima kasih pak Ketua pagi ini kelihatannya gagah betul, gitu tapi sayang tidak pakai topi atau tidak pakai kopiah gitu, kalau pakai kopiah mungkin semakin, semakin apa namanya? Semakin gagah gitu lho. Terima kasih Pimpinan.

Wabilahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih bang Jhon. Saya tadinya mau pakai kopiah tapi saya karena Pak Jhon tidak pakai dan Pak Ace tidak pakai saya ikut tenggang rasa juga.

Baik kami kira kita dahulukan dulu wakil-wakil dari setiap fraksi tadi Golkar sudah, Gerindra sudah, Nasdem ya, Nasdem sudah mungkin dari Demokrat pak Hasani Bin Zuber atau mau diberikan porsinya kepada yang lain? Baik dari virtual Fraksi mungkin PDI Perjuangan dulu ada? Fraksi yang

paling besar dulu, tidak ada pemenang pemilu tidak ada. Baik selanjutnya dari F-PKB ya silakan, Annisa Syakur, Bu Annisa Syakur.

F-PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.A.G.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya.

Pimpinan Komisi VIII beserta jajaran Anggota yang saya hormati.
Bapak Menteri, bapak Sekjen dan Dirjen yang saya hormati.

Langsung saja saya ingin menanggapi beberapa masalah, yang pertama tadi telah disampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang mana sudah kita sepakati bersama tentang pembatalannya. Saya kira itu hanya sebagai info tentang ketidakberangkatan tahun 2020 tersebut.

Yang kedua yang mana tadi disampaikan bahwa tahun 2020 itu atau tahun 1441 Hijriah, itu sudah disediakan ada gelang, ada buku manasik dan lain sebagainya. Menurut saya karena gelang itu ada nama dari jamaah masing-masing, tidak mungkin gelang itu akan dipakai oleh jamaah yang lain, ya tentu oleh jamaah yang tidak jadi berangkat pada tahun 2020 itu yang akan diberangkatkan tahun 2021. Dan biasanya gelang itu diberikan ketika jamaah itu sudah ada di embarkasi. Nah sekarang mengenai buku manasik, karena buku manasik itu pengalaman yang sudah-sudah itu selalu diberikan dalam waktu yang sangat mepet dengan pemberangkatan, sehingga tidak memungkinkan jamaah haji itu untuk bisa membaca, mempelajari buku manasik termasuk do'a-do'a yang diberikan itu tidak bisa dipelajari dengan baik. Nah sekarang sudah dibelikan kami berharap bagaimana minimal buku manasik itu sudah diserahkan kepada jamaah masing-masing, sehingga jamaah itu bisa dari awal mempelajari apa-apa yang ada di buku manasik itu, termasuk do'a-do'a yang akan dibaca ketika ada di Mekah maupun pulang di rumah. Itu yang pertama.

Yang kedua tadi disampaikan persiapan haji tahun 2021, mengenai masalah kuota, kemudian skenario keberangkatan haji, dan lain sebagainya, mengenai mitigasi yang itu sudah kita pahami bersama. Namun yang ingin kami tanggapi adalah tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ketika kita tanya tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah ini atau tahun 2021 Masehi ini? Jawabnya yaitu terlalu dini.

Artinya sepertinya tidak ada apa itu harapan apa-apa, tetapi apa yang disampaikan oleh pak Dirjen tadi nampaknya memberikan harapan kepada kita, dimana pak Dirjen tadi mengatakan di Saudi Arabia itu sudah ada vaksin yang mana tingkat keberhasilannya 94%. Nah kalau memang ada seperti itu kenapa kita tidak bisa melakukan lobby-lobby dengan Saudi bagaimana jamaah haji yang 221.000 ini kiranya bisa berangkat semua nanti tahun 2021 dengan jaminan adanya vaksin tersebut. Nah ini bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini untuk melakukan lobby-lobby agar jamaah haji ini bisa berangkat semua, karena walaupun Covid-19 masih terus ada tapi kalau vaksin itu berhasil saya kira akan bisa dilaksanakan

pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 itu yang kami ingin mendapatkan penjelasan.

Kemudian yang terakhir, seperti kita ketahui bahwa ada 13 jamaah umroh yang terkena Covid-19 ketika ada di Saudi. Kalau tadi yang disampaikan pak Menteri kan diketahuinya itu ada di Indonesia daeri 74 yang kena Covid-19 2 itu saya kira itu sangat bagus, tapi karena yang diketahui di Saudi ini ya artinya kan kita sudah kebobolan, kalau kita tidak tahu, bahwa itu berarti ada kekurang telitian daripada penyelenggara-penyelenggara ibadah umroh tersebut, sehingga bisa menyebabkan 13 orang itu terkena Covid-19. Yang ingin saya ketahui apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap 13, akibat daripada 13 orang yang kena Covid-19 tersebut, yang kami maksudkan apakah tidak ada sangsi kepada para penyelenggara-penyelenggara umroh yang jamaahnya terkena Covid-19 tersebut, atau memberikan peringatan, teguran, atau pembinaan atau bagaimana? Itu yang kami inginkan kejelasan dari bapak Menteri Agama. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya dari virtual kami persilakan, atau dari fisik Partai Demokrat, ada dari virtual? Tidak ada ya, pak Hasani Bin Zuber silakan.

F-PD (H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua, beserta Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati bapak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Yang pertama disini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait yang kami temui di lapangan, perihal pemberangkatan jamaah haji untuk tahun 2021. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen ada banyak asumsi yang saya kira ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita informasikan ke banyak para calon jamaah kita, agar tidak liar terkait masalah asumsi pembatasan, bahkan pembatalan. Jadi ada anggapan untuk haji di tahun 2021 ini mereka bahkan memiliki apa namanya? Informasi tersendiri, saya kira apa namanya bahkan mungkin kawatirnya meyakini bahwa ada pembatasan untuk pemberangkatan calon jamaah haji di tahun 2021. Saya mohon nanti ada solusi terkait dengan bagaimana informasi tidak adanya disinformasi saya kira. Jadi biar mereka para calon jamaah haji ini tidak berasumsi sendiri, sendiri-sendiri seperti itu.

Yang kedua perihal juga terkait masalah jamaah umroh kita yang kita dengar dari berita, dari informasi yang kita terima, ada kasus Covid-19 yang beberapa waktu lalu ini positif bagi beberapa calon jamaah umroh. Kami

sangat berharap ada peningkatan penguatan pencegahan terhadap calon jamaah umroh kita, baik itu pencegahan penularan dan penyebaran. Mohon kiranya nanti juga ada terobosan, ada solusi sehingga kepercayaan baik dari Kerajaan Saudi Arabia ataupun baik dari para calon jamaah umroh kita bahwa mereka *clear and clean* saya kira seperti itu. Ada bersih dari Covid-19.

Terus yang ketiga Ketua, saya ingin menyampaikan juga terkait rencana pemberangkatan calon jamaah haji ataupun umroh, bagaimana juga ada peningkatan terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas para calon jamaah haji dan umroh kita, ini perlu kiranya ditingkatkan. Mungkin itu saja ketua dari saya terima kasih.

Wallahul muaffiq ila aqwamit tharieq.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PKS, ada dari virtual yang mewakili? Ada pak Iskan, ya silakan yang terhormat bapak Iskan Qolba Lubis.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Innalhamdulillah, washalatu washalamu 'ala rosulillah.

Yang saya hormati pak Menteri dan jajaran,

Hari ini kita membahas tentang laporan keuangan pelaksanaan haji, saya rasa inikan laporan yang sederhana saja ya, karena pelaksanaan haji tidak terlaksana dan yang terserap untuk ini baru sedikit. Cuma ini saya agak ragu pak Ketua, kalau tidak salah dulu waktu Dirjen Haji yang lama yang sekarang jadi pak Sekjen waktu dia melaporkan uang yang terpakai itu dulu itu kalau tidak salah itu baru dibilang itu gelang, tidak disebutkan buku manasik haji, coba dilihat di catatannya ya, jangan sampai dipaksakan gitu. Kalau memang tendernya itu sebelum pembatalan itu kan berarti masih bisa dibatalkan, itu apa saya lupa tapi ingatan saya seingat saya itu yang ada pengeluaran itu hanya gelang dan ada salah satu daerah melaksanakan manasik yang itu yang banyak dikritik di Jawa waktu itu. Coba itu dijawab dulu nanti ya, itu yang pertama tentang manasik.

Yang kedua saya lihat pak Menteri ini terlalu percaya sekali bahwa haji seolah-olah terlaksana. Nah ini perlu dipahami bahwa vaksin itu kemungkinan besar baru ada itu di bulan Maret, itu saya analisa dari beberapa sumber, nah bulan Maret itu sudah bulan Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadhan, Sawal. Jadi hanya tiga bulan lagi sebelum pelaksanaan haji. Nah ini perlu juga diantisipasi pak Menteri,antisipasi itu kalau tidak terjadi haji sebenarnya tinggal dibatalkan ya, tapi jangan sampai kita banyak belanja gitu.

Yang kedua ini yang informasi yang berkembang di Saudi, walaupun pelaksanaan haji tahun ini yang jelas itu biaya haji sangat mahal sekali, itu

perlu dicari penyelesaiannya, sebab kalau nanti dana optimalisasi ini sudah tidak cukup saya hitung-hitung. Ya katakanlah ada 15% untuk pajak, kemudian Saudi merencanakan akan menambah biaya untuk hotel, jadi umpamanya yang selama ini sekitar 4.000 kemungkinan bisa 6.000 jadi naiknya itu besar sekali. Apalagi kalau, kalau tiketnya umpamanya juga naik.

Jadi ini sangat, sangat membahayakan sistem keuangan haji ya, karena selama ini dana optimalisasi saja hanya dipakai oleh jamaah yang sudah haji, sedangkan jamaah haji belakangan mereka tidak punya dapat hasil gitu. Kecuali yang tidak ada virtual yang sedikit itu ya, hanya 10% sampai 20%, jadi ini perlu dicari penyelesaian ke depannya, jangan, jangan Menteri dan Dirjennya tenang-tenang saja, karena kemungkinan walaupun jadi haji sangat mahal sekali darimana dananya? Tidak mungkin diambil dananya dari pokok haji yang tabungan Rp.25.000.000,- itu. Nah kalau keuntungannya selama ini BPKH itu sudah tidak optimal dia keuntungannya hanya sekitar 6% sampai 7%, itu dia tidak memenuhi sesuai dengan janjinya yang mengatakan waktu mereka waktu dinilai mereka itu sebelum dinilai mereka bilang 12%, jadi jauh sekali. Artinya ini masalah pendanaan haji optimalisasi adalah masalah terbesar ke depannya, karena memang selama inikan haji ini tidak dinaikkan.

Nah itu perlu Menteri membuat satu rekayasa seperti apa kedepannya? Atau mungkin melakukan pembicaraan dengan BPKH. Itu saja mungkin yang perlu diklarifikasi itu tentang buku haji tadi, itu saja pimpinan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, selanjutnya yang terakhir dari F-PPP ada? Eh sorry-sorry dari PAN dulu, dari PAN, ya PDI setelah ini ya.

Silakan yang terhormat bapak Asli Chaidir dari Fraksi PAN DPR RI, Dapil Sumbar I.

F-PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ikhsan, pak Ace Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII, baik yang hadir langsung maupun yang virtual.

Yang saya hormati bapak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mendalami beberapa hal yang telah disampaikan oleh Menteri Agama RI mengenai laporan keuangan anggaran ibadah haji tahun 2020 dan persiapan pembicaraan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Yang kedua laporan keuangan yang disampaikan realisasi

penggunaan anggaran dipaparkannya untuk dua komponen saja, yaitu pengadaan gelang jamaah haji, jamaah regular dan jamaah haji khusus, serta untuk pengadaan buku manasik haji untuk jamaah haji regular dan jamaah haji khusus.

Disebutkan dalam paparan bahwa realisasi penggunaan pengadaan buku manasik sudah 100% dilakukan. Pertanyaan saya, bagaimana jika calon jamaah haji yang berhak berangkat di tahun 2021 dan seharusnya berangkat tahun 2021 lalu meninggal dunia? Atau berhalangan karena sakit apakah digantikan dengan urutan selanjutnya? Jika digantikan bagaimana pengadaan buku manasiknya untuk calon jamaah pengganti ini? Karena otomatis yang bersangkutan pasti belum mendapatkan buku manasik dan gelangnya?

Yang kedua untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 maskapai yang akan melayani calon jamaah haji adalah tiga maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan juga ada pendatang baru yaitu Flynas Airlines yang merupakan anak perusahaan Saudi Arabia Airlines tidak pernah diundang rapat ketika Panja tahun lalu. Bagaimana Flynas ini bisa mendapat kesempatan menjadi calon pemenang tender maskapai haji Indonesia? Disisi keamanan dan kenyamanan yang dimiliki oleh fasilitas-fasilitas Flynas ini saya menyarankan agar pada penambahan ketiga tahun 2000 pembahasan ketiga tahun 2021 kita memanggil juga Flynas Airlines untuk digali mengenai kesiapan fasilitasnya.

Yang ketiga besaran BIPIH atau biaya yang dibiayai oleh jamaah haji disatu sisi diharapkan terus naik oleh BPKH, sementara Menteri Agama pada rapat kerja yang lalu mengatakan bahwa BIPIH tidak perlu naik, kalau bisa sama dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 ini BPKH mendapatkan dana tambahan dari pembebasan pajak yang mulai berlaku sejak undang-undang Cipta Kerja ditanda tangani. Meskipun belum ada peraturan Menteri Keuangannya, tapi pembebasan pajak sudah otomatis berlaku peraturan Menteri Keuangan dan berlaku surut sejak undang-undang Cipta Kerja disahkan. Begitu selaku wakil dari calon jamaah haji kenaikan BIPIH pada tahun 2021 menurut hemat saya tidak perlu dilakukan, penambahan biaya dapat diperoleh dari nilai manfaat keuangan haji untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 batal dikeluarkan serta diambil dari alokasi pajak yang sudah dihapus.

Yang terakhir ada 10 inovasi yang direncanakan oleh Kementerian Agama dalam rangka persiapan penyelenggaraan haji tahun 2021. Saya kira ini baik dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji kita, namun dari 10 inovasi tersebut kita juga harus hati-hati jangan sampai justru memberatkan dan menjadi masalah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Seperti inovasi pembayaran non teler, dan non tunai terutama pada penyediaan *living cost* tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai, diberikan dalam bentuk debet dan bisa menjadi kartu identitas jamaah dan sarana pembayaran. Seperti kita ketahui masyarakat kita banyak juga yang belum paham dan belum terbiasa dengan cara-cara yang melibatkan teknologi seperti itu. Hal ini tentu perlu kajian yang lebih serius apakah inovasinya benar-benar bisa berjalan dan manfaat bagi jamaah haji?

Dan ulasan saja pak Menteri beserta Dirjen Haji, kami pernah ada pertemuan dengan Kanwil, dengan Jagong haji, bahwa banyak keluhan-

keluhan tentang kekurangan manasik dan keterlambatan dari buku manasik ini. Jadi ini kami sampaikan apalagi kita sudah sangat terlalu lama, mudah-mudahan pada kalau andaikata besok periode tahun depan ini bisa kita naik haji, ya tentu ini mohon dapat disempurnakan pendistribusiannya. Itu saja pak Menteri dan Pak Ketua rapat yang saya hormati, terima kasih banyak.

Billahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat bapak H. Arwan M. Aras, T. S.kom dari PDI Perjuangan Dapil Sulbar.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARWAN M. ARAS T, S.Kom.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta Wakil Pimpinan dan Anggota yang hadir di Komisi maupun hadir virtual.

Yang saya hormati bapak Menteri Agama dan para Eselon I dan Eselon II.

Saya langsung ke materi Pak Menteri tadi ini terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2020 Kementerian Agama RI telah melakukan realisasi anggaran operasional ibadah haji tahun 2020 sebesar 89,73%. Tentu dari pemaparan pak Menteri ini yang kita sempat dengar tadi belum tergambar dalam pemaparan pak Menteri Agama penjelasan tentang 4 dampak penggunaan dana tersebut, apakah ada peningkatan kualitas ibadah haji tahun 2021? Sebab kita ketahui pak Menteri ini pemberangkatan ibadah haji itu batal, harusnya penggunaan dana tahun ini yang telah digunakan itu memberikan dampak peningkatan layanan haji. Jangan sampai tampak persepsi publik yang berkembang dana haji dibatalkan kok dana operasionalnya terpakai, digunakan untuk apa dana tersebut? Ini kami reses pak banyak sekali pertanyaan, apa yang kami dapatkan nanti setelah yang tertunda di 2020 ini berangkat di 2021? Nah pertanyaan-pertanyaan inikan harusnya terjawab hari ini oleh pak Menteri, saya ingin penjelasan yang lebih komprehensif dari pak Menteri mengenai dampak peningkatan layanan haji tahun 2021.

Kemudian pak Menteri untuk Dapil saya Sulawesi Barat saya sangat berharap perhatian dari pak Menteri dalam pengadaan pembenahan dan renovasi KUA sebagai barisan terdepan pelayanan tahun depan kepada umat saya minta kepada pak Menteri memberikan perhatian. Kemudian ada hal yang lebih penting dari itu pak Menteri, kita sudah hampir 1 tahun ini terus rapat seperti ini, namun saya jujur kita selalu membahas itu-itu terus, kita belum pernah membahas bagaimana dengan umat lain? Maksud saya umat

lain ini, umat yang di luar umat Islam baik saudara-saudara Kristen, Katolik, Hindu dan lainnya. Pemerintah disini untuk di Sulawesi Barat ini belum hadir pak Menteri, saya berharap pak Menteri sekali-kali kita undang dengan khusus melalui Pimpinan semoga pak Menteri ini bisa ke depan jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Karena harapannya saya itu pak, kita bagaimana caranya pemerintah hadir di Sulawesi Barat ini terkhusus Kementerian Agama. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Oak Arwan Aras, selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PPP, ada? Atau yang mewakili. Baik kami persilakan dari meja Pimpinan, yang pertama mungkin ya yang terhormat bapak Haji Marwan Dasopang, Wakil Ketua dari Fraksi PKB Dapil Sumut II.

WAKIL KETUA/F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan sidang, para Wakil Ketua, para Anggota.
Bapak Menteri, Sekjen, pak Irjen, Dirjen dan seluruh jajaran.

Hari ini kita sebetulnya hanya raker bersama Menteri terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dalam kaitannya pertanggungjawaban laporan operasional. Kalau tidak salah di bulan Juli sebetulnya kita sudah lupa saya tanggalnya, bulan Juli kita menyetujui dengan perdebatan yang panjang tentang penggunaan anggaran untuk gelang dan buku manasik. Dengan penjelasan dari pak Dirjen pada akhirnya kita memahami bahwa langkah itu sudah tidak bisa mundur, maka kita menyetujui untuk pemakaian anggaran karena nanti berakibat panjang. Oleh karena itu siklus ini sebetulnya selalu terjadi kita meminta laporan pertanggung jawaban, tetapi karena dua hal saja ya tiga halah satu gelang, yang kedua buku, yang ketiga operasional lain tentu sebutannya itu saja tidak ada yang lain-lain, kalau dulu kan ada bus, ada macam-macam ada makan ada lain-lain. Jadi tidak tentu tidak bisa keluar dari buku dan gelang, karena itu kita tetap sebut gelang dan buku saja.

Maka karena itu hanya catatan-catatan saja sebetulnya kalau menurut saya, pertama ya biasa saja sebetulnya, karena disini ada saldo akhir, saldo akhir yang istilah yang kita pakai selama ini efisiensi namanya. Efisiensi yang akan dilaporkan ke BPKH, biasanya kalau pak Nizar dulu sebelum menjadi Sekjen masih Dirjen kita bertanya sebelum dilapor ke BPKH apakah masih ada kebutuhan lain sebelum diserahkan? Karena itu tentu catatannya tinggal disitu pak, 1,621 ini supaya pak Anggito merasa tenang dan tidak melirik terus efisiensi ini karena itu kan menjadi, menjadi pemasukan di BPKH. Maka karena itu prinsipnya saya dan Fraksi PKB dapat menerima laporan pertanggungjawaban operasional haji.

Yang kedua mengenai persiapan pelaksanaan haji tahun 2021 catatannya adalah kita nanti akan bicarakan selanjutnya di forum lain, dan bahkan itu di pembentukan Panja. Tapi kami ingin menyampaikan pak Menteri seluruh jajaran terutama pak Oman, supaya tidak ada *statement* dulu tentang baik BPIH, baik BIPIH untuk tahun 2021. Karena apa yang disampaikan oleh pak Menteri dengan paparan ini beberapa hal yang belum terduga apa yang terjadi di tahun 2021 masih meraba-raba semua. Apakah itu kuota? Apakah itu besaran harga? Maka karena itu tidak bijak kalau kita nanti membuat *statement* BPIH kita, sehingga menjadi polemik dikemudian hari.

Saya melihat pertama, apa yang disampaikan oleh teman-teman katakanlah besaran harga karena pajak, besaran harga karena jaga jarak, besaran harga ya semua itu berpengaruh. Karena itu kalau kita menyebutkan bahwa katakanlah ongkos haji tidak naik, itu berbahaya, nanti kita dituntut masyarakat, atau bisa itu mempermalukan Komisi VIII. Umpamanya pemerintah mengajukan katakan budjetnya hanya sekian, tapi itu bahaya akhirnya kita rapat lagi harus dinaikan, itu kan yang dituntut nanti DPR yang menaikkan. Lha padahal angka-angka itu, oleh karena itu forumnya nanti ada pembicaraan ini, tetapi saya setuju kalau Kementerian Agama mulai mengoret-oret kira-kira langkah-langkah alternative. Tapi langkah-langkah alternative inipun ikut dengan kajian, katakan begini, memberangkatkan sebagian, memberangkatkan sebagian itu seperti apa caranya?

Kemudian prosedur kesehatan seperti apa kalau Covid-19nya masih ada tapi bisa berangkat dengan prosedur kesehatan? Itu semua boleh dikaji, boleh dibuatkan alternatif-alternatif tetapi itu tidak untuk keluar, nanti kita ke dalam saja. Kalau tidak sekarang sudah mulai resah dimasyarakat, kemarin saya dari Medan pak Wamen juga memberikan pandangan disitu, pertanyaannya pak kalau memberangkatkan haji setengahnya siapa yang setengah itu? Kalau sudah ketemu setengah tiba-tiba umurnya tidak boleh sampai umur 60 tahun lha istri saya muda pak katanya, saya tidak bisa berangkat istri saya berangkat bagaimana itu?

Nah ini dari informasi yang ada ini membuat masyarakat resah, karena itu pembicaraan kita mengenai 2021 nanti ada forumnya dan disitu kita lakukan, maka kajian itu tidak perlu keluar tapi itu untuk nanti menjadi pembahasan kita yang menurut kita keputusan Saudi sudah ada, keputusan Pemerintah Indonesia ada, dan kita akan melakukan. Kami kira itu catatan kita dalam rapat ini, kembali lagi prinsipnya tentang keuangan saya menyetujui tentang persiapan boleh dioret-oret tapi belum boleh keluar. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Anggota A – 289 Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar II.

F-PG (H. JOHN KENNEDY AZIS. S.H.):

Pimpinan. Ada apakah gerangan Pimpinan pagi ini? gitu kan ya, ini jadi tanda tanya saya ini, perasaan saya jadi tidak enak ini.

WAKIL KETUA/F-PG (DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Terima kasih pak Ketua, ini pak Ketua sekarang yang lain pengganti.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri, Pak Sekjen, pak Dirjen dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal PHU yang kami hormati.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama apa yang kita rapatkan ini adalah perintah dari undang-undang, bahwa setiap perjalanan haji jadi atau tidak jadi maka harus dilaporkan, karena ini adalah menyangkut dengan uang atau amanah rakyat. Untuk itu tentu kita harus pahami bahwa rapat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dari Menteri Agama sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji. Dan oleh karena itu maka saya memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban pak Menteri, walaupun saya kira soal perdebatan substansinya telah kita bahas dalam beberapa kesempatan yang lalu, karena terjadi pembatalan haji. Nah apa yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa untuk berbagai kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 yang berasal dari APBN kan sudah disampaikan oleh pak Menteri dan juga pak Sekjen waktu itu, termasuk soal berapa yang digunakan untuk persiapan haji dan lain-lain.

Sementara kalau yang sekarang ini berasal dari dana nilai manfaat yang didapatkan dari BPKH. Salah satu hal saya kira pak Menteri dan pak Plt. Dirjen PHU saya tadi bisik-bisik sama pak Iksan di era teknologi informasi seperti sekarang ini kayaknya kok kita masih jadul ya menggunakan gelang gitu. Mungkin perlu dipikirkan sistemnya jadi sistem *barcode*, menggunakan GPS sehingga tidak terkesan tidak efisien dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji walaupun memang semangatnya waktu itu kenapa harus ada gelang? Sebab kalau orang Indonesia yang tua-tua, yang sepuh-sepuh katanya itu kalau pakai gelang tidak bisa dicopot gitu kira-kira begitu. Tapi kan sekarang dengan penggunaan teknologi informasi yang begitu sangat canggih ya, jadi saya kira seharusnya kita lebih *up to date* lah itu, tapi intinya yang ingin saya sampaikan kepada bapak Menteri bahwa kami menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, dan tentu karena memang tidak ada perlu ada yang perlu dipertanggungjawabkan secara krusial karena hanya dua hal yang dipergunakan itu.

Yang kedua pak Menteri saya sebetulnya ingin menanggapi pada rapat kerja yang lalu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak ada

kenaikan untuk BPIH atau BIPIH tahun 2021. Saya mengutip dari kang Oman tadi, sebetulnya itu juga *Mazalamubaqiron* pak, menurut saya itu *mazalamubaqiron* itu sangat terlalu pagi untuk disampaikan seperti itu. Kenapa? Karena harusnya itu dibahas setelah kita duduk bersama, untuk membedah ditengah pertama tentu kita tahu ini adalah pandemi, maka konsekuensinya proses pembiayaan juga pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, setidaknya kalau belajar dari pengalaman umroh tahun ini misalnya, kan kita bisa menyaksikan, setidaknya minimal 30 juta biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan umroh. Tetapi untuk haji bisa juga begitu, apalagi kalau kita bisa bayangkan satu sekarang satu kamar, kalau misalnya asumsinya harus kalau kemarin-kemarin kan satu kamar 4 orang sampai 5 orang, kalau di era pandemi bisa saja satu kamar cuma 2 orang, itu kan konsekuensinya atau mungkin kata pak Kyai Marwan 1 orang. Itu kan konsekuensinya pasti akan membludak terhadap pembiayaan dan lain-lain.

Atau misalnya ongkos pesawat yang harus menggunakan *physical distancing* dalam pesawat sehingga kapasitas 500 pesawat harus diisi 250 orang gitu. Itu menjadi sangat besar pembiayaannya, dan saya kira kalau misalnya masyarakat bisa dijelaskan oleh kita, fakta yang sesungguhnya jangan sampai menimbulkan penarikan yang terlalu besar dari nilai manfaat, saya kira mungkin masyarakat juga bisa mengerti. Jadi sekali lagi pak Menteri dengan segala hormat apa yang disampaikan oleh pak Menteri pada raker kemarin, saya mengutip pak Prof. Oman Faturahman itu *mazalamubaqiron* namanya pak, ya terlalu pagi kita untuk menentukan itu sebelum kita buka bersama apa namanya? Fakta obyektif dari progres pembiayaan itu. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh pak Menteri ya tadi kemungkinan kita mengambil tiga skenario itu. Saya tadi senang sekali ada penjelasan dari pak Prof. Oman ya, bahwa yang membuat resah sekarang inikan dimasyarakat ketika haji hanya dibatasi sampai usia 50 tahun yang disamakan dengan umroh umum masyarakat ini apa namanya resah lho pak. Kalau gitu kapan kami bisa berangkat? Sementara kalau tidak salah 68% dari calon jamaah haji kita itu semua di atas 50% eh 50 tahun.

Jadi oleh karena itu memang menurut saya pak Plt. Dirjen mohon apa? Didamaikanlah gitu ya supaya jangan sampai membuat masyarakat yang sudah daftar puluhan tahun akhirnya kemudian dia menjadi down gara-gara kebijakan ini. Nah oleh karena itu pak Menteri saya mengusulkan pembahasan tentang BPIH untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan setelah ada sinyal yang positif dari pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji ini. Jangan sampai nanti kita sudah menentukan pembahasan Panja dan lain-lain setidaknya mungkin kita nanti akan membahas pada persidangan yang akan datang, tidak pada persidangan yang sekarang ini. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat bapak Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A. dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim II.

WAKIL KETUA/F-P GERINDRA (LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat bapak Menteri Agama beserta jajaran. Rekan-rekan dari Komisi VIII yang saya muliakan.

Kami ada beberapa pertanyaan, pertanyaannya pendek-pendek saja mudah-mudahan jawabannya yang panjang. Karena banyak orang terbalik tanyanya dua meter jawabannya cuma satu senti, ini mana yang goblok tidak jelas. Kami pendek saja pertanyaannya, tapi nanti mohon dijelaskan secara baik.

Yang pertama di halaman 3 laporan pak Menteri adalah disini realisasi anggaran per 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Kalau dihitung bulan pak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 7 bulan kenapa begitu lama? Padahal tidak ada ibadah haji di tahun ini, kok lama sekali buat laporan, apa kurang jagoan membuat laporannya atau kenapa?

Yang kedua di halaman 6 di tabel 2 pak, disini kami melihat bahwa ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas bapak menyebutkan ada saldo pak 1,6 miliar pak, tapi tidak jelas digunakan untuk apa pak? Tidak ada penjelasannya pak ini, bapak gunakan untuk apa ini? Karena habis itu langsung bapak cerita catatan atas laporan. Kami ingin mendengar bahwa uang itu dikembalikan kepada negara atau untuk kepentingan yang lain menurut saya digunakan untuk kepentingan yang lain pak, masih banyak yang bisa kita alokasikan disana. Di tabel 2 itu pak,

Yang ketiga di halaman 7, halaman 7 mohon dilihat tiga carli (3c) tidak memberangkatkan jamaah haji, jika kebijakan pemerintah Arab Saudi menjalankan ibadah haji hanya untuk lingkup terbatas. Ini batasannya apa lingkup terbatas ini? ini terbatas tapi tidak jelas batasnya bapak, jadi mohon bapak elaborasi sedemikian rupa sehingga kami tahu untuk menerjemahkan kalimat yang terbatas itu.

Tambahan pak di luar ini, mengenai umroh pak kita tahu bahwa *panjenengan* tadi menjelaskan tambahan umroh usia 18 sampai dengan 50 tahun. Apa alasan Arab Saudi untuk menentukan umur ini, padahal kalau pendekatan lansia itu pasti di atas 50. Apa itu berarti tidak sehat? Di atas 50 juga tidak bisa menjawab barangkali, mohon ini ada penjelasan dari Arab Saudi. Supaya yang diingat adalah jangan sampai secara psikologis bangsa Arab, orang Arab merasa Ka'bah itu miliknya, Nabawi itu miliknya bukan, bahwa itu adalah ketempatan karena Allah. Tapi milik ya miliknya orang Islam sedunia dong, sehingga ada hak-hak yang kita miliki untuk bertanya, hak

yang kita miliki untuk menyarankan, hak yang kita miliki bahkan kalau tidak beres yang kita tegur negara Arab. Jangan Arab mesti lebih hebat dari kita, belum tentu sekali lagi, ini perlu keberanian pak. Kenapa kok demikian tadi kalau pendekatan lansia? 18 tahun juga kenapa, bahkan akil balig kalau anak laki-laki sudah maaflah umur 14 sudah bisa itu *ngenthu-ngenthu* itu. Iya kan?

Yang terakhir pak, saya mendapat tugas melakukan jamaroh di akhir Oktober pak, ada 5 titik pak, jamaroh katanya singkatannya jagong masalah umroh dan haji. Saya lihat yang pertama adalah waktu tempat, pendekatannya pak di setiap kabupaten dipilih satu titik pak. Sehingga kalau kami dua kabupaten 2 titik ditambah kuotanya 2 titik jadi 4 titik. Pertanyaan saya kenapa hanya 4 titik? Karena itu sangat bermanfaat. Yang kedua undangan jangan-jangan Kementerian Agama tidak sampai memonitor siapa yang diundang? Jangan-jangan Paijo, Paimin tidak jelas, musti orang yang diundang karena jumlahnya bayangkan sak kabupaten cuma diambil 100 sedangkan yang diundang Paijo, Paimin yang tidak punya multiple efek pak. Sehingga saran kami yang diundang ditegaskan kepada Kakamenag di kabupaten kota orang-orang Tomas, Toga dulu saja imam masjid misalnya punya efek, guru-guru ngaji misalnya, punya efek pak guru madin.

Tapi kalau orang yang maaf, mohon maaf bukan ngenyek siapa-siapa tapi kalau tidak punya multiple efek kan sayang pak, bapak punya kemampuan yang 100 orang pulang ditinggal tidur pak. Coba kalau bapak pilih bapak tegaskan dari sini yang diundang adalah toga, tomas dan sebagainya, kalau perlu namanya dikirim kesini di *cross check*, kami agak heran pada waktu dikenalkan bahwa saya Anggota DPR itu tidak ngerti, jangan-jangan tukang bakso Anggota DPR RI ini. Karena tadi maaf bukan *ngenyek* saya, bukan *ngenyek* sekali lagi, bukan levelnya perlu banyak yang lihat, nanti ada masanya setelah toga, tomas mungkin dilevel bawahnya apakah tugas kami di DPR RI atau diserahkan kepada kami atau DPRD kabupaten dan kota, sehingga ada kesinambungan pak.

Kemudian jumlahnya 100 orang saya maklum karena musim pandemi, *lajeng* undangan tadi sudah kami pembicara pak sangat bagus waktu saya dari DPR RI Komisi VIII ditambah lagi yang dari Kanwil pak, kalau beliau berhalangan masih mau nyuruh stafnya atau sampai Kakamenag. Karena mereka berpengatahuan tentang ini, kalau tidak tidak nyambung pak. Tolong ini menjadi perhatian karena sangat bagus.

Yang ketiga pak, ada saya diundang bicara juga penataran untuk para penatar ada 80 orang waktu itu, katanya dia staf Kakamenag, atau KUA. Ini juga penting pak, ini yang saya katakan dia punya multiple efek tadi, sehingga mohon ini menjadi masukan bagi bapak, karena Anggota kami kan 54 orang pak, kalau ini bapak bisa kirim ke daerah-daerah tadi, iya kan? Kami dibantu pak waktu itu hotel kalau tidak punya tidur di hotel ya silakan, dan pesawat pun dibantu. Ini adalah meringankan kita tapi sekaligus punya efek yang multiple, apalagi pembicaraan hari ini ada kebijakan di tahun 2021 yang kita kaitkan bagaimana kebijakan di tahun 2020 ini.

Yang terakhir pak mohon izin bahwa kami didaerah selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan bapak, oleh karena itu kebijakan yang kami terima kadang-kadang tidak cocok didaerah bukan manipulasi, demi Allah bukan pak, tapi akan kita selaraskan dengan

pengetahuan mereka. Lebih contoh saja kalau mereka bertanya kenapa sih kok pak Menteri sekian bulan lalu bicara soal orang cingkrangkah, orang yang milenial itu kami motivasi, modifikasi sedikit agar mereka bisa terima dengan baik. Karena saya yakin tujuan Kementerian Agama untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah untuk kebaikan kemaslahatan umat. Itu pak kami izin. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, terakhir mungkin dari saya sendiri, pak Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang kami hormati.

Tadi sudah diterangkan mengenai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khusus yang anggarannya berasal dari hasil nilai manfaat. Ada sekitar 6,619 realisasi dan itu ya alhamdulillah baru buku dan gelang, saya sepakat dengan pak Ace saya rasa pak Menteri juga harus mulai berpikir bagaimana gelang ini bisa lebih manfaat, karena sekarang zamannya sudah sangat maju sekali. Masa sekelas pertunjukan U2 di Singapore gelangnya sudah pakai *chip* gitu ya, setiap lagi gelangya warnanya beda pak. Itu anak-anak saya kalau nonton saya lihat itu, lagu a warna gelangya warnanya berubah jadi hijau, lagu b gelangya berubah warna jadi merah gitu. Jadi panggung itu berubah-ubah warnanya, itu saja mereka bisa laksanakan, masa Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai trevel haji terbesar di dunia tidak bisa mengadakan itu? Dimana yang penting fungsinya adalah bagaimana mungkin GPS tracking ya, GPS tracking kalau pak Menteri punya usaha logistic ya punya truk pasti ditaruk GPS tracking Pak, lah ini manusia lho pak. Saya rasa ini bisa kita coba dianggarkanlah supaya pelayanan haji itu semakin hari semakin baik. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan pak Menteri kalau misalnya saya kurang setuju dengan adanya pengadaan yang harus disimpan selama setahun. Karena ini pasti ada ekstra biaya, contoh buku manasik haji dan gelang yang hari ini sudah terlanjur kita adakan, dan harus dipakai tahun depan kan pastinya ada ekstra cost pak, ekstra biaya untuk penyimpanan. Kalau di Jakarta ya bapak sewa gudang itu semeter persegi itu Rp.70.000,- ya semeter persegi kurang lebih Rp.70.000,- per bulan kalau dia setahun pasti biayanya lumayan gitu, belum lagi ada resiko apalagi kalau bicara buku manasik, itukan sangat rentan dengan kondisi cuaca di Indonesia yang sangat lembab gitu dan mungkin hujan dan seterusnya. Artinya ibu bapak pak Menteri kalau misalnya ada kerusakan siapa yang bertanggungjawab? Ini harus dipikirkan juga, kalau jaman dulu teman-teman digudang itu biasa kalau misalnya mulai main *hengky pengky* banjir air masuk barangnya tidak dipinggirkan itu, nanti laporan ke polisi barang rusak semua kan begitu, jadi biaya untuk laporan akhir tahun begitu. Nah ini juga harus dipertimbangkan pak Menteri dengan barang yang sangat mudah hancur terutama untuk buku manasik haji.

Kemudian yang kedua masalah umroh, pak Menteri dan Pak Oman selaku Dirjen Haji Khusus dan eh Dirjen PHU sorry kemarin soalnya habis bicara sama pak Arbi jadi saya ingatnya Direktorat Haji Khusus dan Umroh. Pada tanggal 18 November 2020 raker kita tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan Islam dimasa pandemi Covid-19, ada kesimpulan yang mengikat bersama. Poin 1 huruf a menekankan secara tegas kepada PPU untuk memberlakukan karantina bagi calon jamaah umroh sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dan setelah kepulangan dari Arab Saudi. Poin b memanfaatkan asrama haji sebagai tempat karantina sebagai calon jamaah umroh. Dan poin c meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Covid-19 dan otoritas Pemerintah Arab Saudi dalam penerimaan, penerapan kebijakan protokol kesehatan bagi calon jamaah umroh.

Saya dengar visa umroh sudah keluar lagi, bahkan per hari ini, ya? ini sudah ada yang berangkat, pertanyaan kami apakah tiga poin ini sudah dilaksanakan dan sejauhmana pak Menteri sudah berkomitmen dengan apa yang kita usulkan? Pak Menteri dan seluruh jajaran, jangan lupa sesuai dengan undang-undang bahwa kesimpulan rapat ini mengikat kita semua. Ya jangan sampai tidak dilaksanakan atau tidak dihiraukan, oleh karena itu kami minta sejauhmana poin-poin yang sudah kita sampaikan ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan bekerja sama atau *memonitoring* PPU yang ada. Karena kita tahu izinnya kan masih di bapak, iya kan? Izinnya masih di bapak, kalau misalnya mereka macam-macam kan bisa saja dicabut.

Demikian pertanyaan dan juga masukan saran dari seluruh Anggota dan Pimpinan, saatnya sekarang kami persilakan pak Menteri dan seluruh jajaran untuk menjawab.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Baik Pak, terima kasih banyak. Senang sekali banyak masukan yang bisa kami gunakan untuk menjadi bahan pembenahan kami ke dalam. Tentang pak Rudi Nasdem memang perlu ada loby-loby lebih lanjut saya kira kita memang tidak berhenti melakukan loby. Kemudian masalah gelang saya kira tadi sudah diluruskan oleh beberapa teman Anggota. Kemudian masalah pak Jeffry sumber lain penerimaan itu angkanya Rp.1.000.000.000,- itu dari giro pak, dari giro selama beberapa. Kemudian masalah menyarankan komunikasi dengan Arab Saudi perlu ditingkatkan lagi saya kira saya sependapat sekali, tetap kita lanjutkan dan sepertinya hampir tidak pernah berhenti pak seetiap hari itu juga kami lakukan. Tapi tentu saja masih perlu lebih efektif lagi, dan kami mohon juga bantuan dari teman-teman Komisi VIII juga untuk membantu juga berkomunikasi. Biasanya apalagi kalau ngomong tentang kuota malah kami juga biasa minta bantuan Bapak Presiden juga bisa sedikit membantu begitu.

Kemudian pak John Kennedy saya kira sependapat bahwa apa yang terjadi tahun 2020 lalu jangan terulang lagi. Kemudian kalau masalah gelang dan buku, buku sudah didistribusikan, kalau gelang masih di vendor, sekaligus menjawab tadi bapak yang anu tidak mengeluarkan biaya sedikitpun tentang itu. *Down payment*, malah sama sekali belum ada yang

dibayar pak, jadi alhamdulillah aman kita, karena dulu juga ada arahan dari teman-teman di Saudi juga bahwa *down payment* jangan dibayar dulu dan memang kami belum pernah niat untuk membayar itu. Terima kasih pak.

Kalau Bu Annisa tentang gelang saya kira sudah sepakat tadi, kalau buku manasik sudah kita sampaikan ke jamaah. Vaksin sudah ada saya kira betul kita nanti mungkin masih paling *loby-loby* lagi, kita tidak boleh mudah-mudahan tidak mau terpaksa hanya vaksin Arab Saudi mestinya ini. Nah pemerintah kita juga sudah melakukan banyak pembicaraan dengan negara lain tentang vaksin ini.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri mohon maaf sedikit. Jadi tadi untuk buku sudah didistribusikan ke semua calon jamaah haji?

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Betul.

KETUA RAPAT:

221.000 orang?

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Oke baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Kemudian masalah ada yang 13 positif, yang rombongan pertama 8, yang kedua 5 sekarang sudah kembali semua. Hanya ada sangsi saya kira karena itu memang waktu itu pemberituannya sangat tergesa-gesa sehingga kami hanya memberikan peringatan saja. Tapi ke depan kemudian kami tekankan sekali bahwa nanti kalau masih terjadi pasti akan kita jadikan jatuhkan sangsi yang berat begitu. Dan alhamdulillah yang tanggal 8 tidak ada yang positif, kemudian yang tanggal 22 kemarin berangkat itu ada positif 2 tapi ketahuannya sebelum berangkat ke Saudi, sehingga saya kira mereka sudah melakukan banyak hal tentang itu. Sekalian saja kami laporkan juga, mereka juga sudah melakukan karantina, sudah melakukan Swab juga selama di karantina, kami memang sudah menawarkan asrama haji, tapi kami

lihat yang sekarang mereka masih memakai hotel. Tapi mungkin karena memang sejak awalnya memang sudah mem-*booking* hotel itu, tapi ke depan kami akan coba menawarkan untuk masuk asrama haji saja sehingga kami lebih mudah mengawasinya begitu. Dan kemudian tentu saja akan kita buat juga dengan di asrama haji pasti biayanya bisa lebih murah, nanti kami akan bicarakan lebih lanjut.

Pak Hasani saya setuju untuk lebih awal diberikan informasi perkembangan haji pada para jamaah, sehingga mereka tidak tetap *well inform* lah tentang situasi ini. Disabilitas untuk haji ini saya kira menjadi perhatian kita, saya belum pernah dengar memang tentang masalah kesiapan kita untuk memberikan fasilitas khusus kepada teman-teman *disable* ini. Terima kasih sekali masukannya akan menjadi bahasan kami ke depan. Pak Iskan Lubis kembali masalah gelang, kemudian kenapa waktu antisipasinya sangat pendek saya kira betul untuk ke depan harus kita lebih waspada. Kalau keputusan itu mungkin 2 bulan sebelumnya gitu misalnya, kekuatan sekian atau 20% atau 50% memang kita menjadi agak tergesa-gesa sekali, memang perlu kita antisipasi jauh-jauh hari. Saya kira memang oleh sebab itu komunikasi dengan Arab Saudi sangat penting sehingga pada saat dia menyebarkan isu saja sedikit ada kemungkinan 75% kita sudah siap-siap 75%, mungkin dua hari kemudian 50% cepat-cepat 50%, mau tidak mau kita harus seperti itu. Dan memang kita tidak bisa banyak selalu ya mohon maaf kita kenallah Saudi begitu ya, tidak terlalu mau di ini, tapi tetap kita melakukan perbaikan melakukan loby-loby.

Sebagaimana saya sampaikan yang lalu malah kalau saya lihat lobinya sangat intens sekali dari kita. Bapak Presiden ikut bantu loby, DPR, Ketua DPR juga, Ketua DPD juga semua melakukan loby mudah-mudahan makin banyak loby kita ini dan tentu saja Kemenag tidak pernah putus melakukan loby-loby, mudah-mudahan kita akan mendapat persiapan yang lebih baik. Dan kami sudah kami pikir memang akan terjadi kenaikan yang cukup besar masalah ongkos haji, yang lalu kami tidak memutuskan tapi kami menyarankan pada teman-teman DPR untuk sama-sama bagaimana kita coba supaya jangan ada kenaikan begitu yang lalu.

Pak Asli Chaidir jamaah yang meninggal bagaimana bukannya? Ya bukannya memang sudah ada dipihak mereka, sudah ada di masing-masing jadi kalau meninggal kan bisa dia berikan kepada ahli warisnya siapapun yang dia tunjuk mengutus secara resmi kemudian nantinya bukannya sudah ada disana. Tentang masalah penerbangan nanti memang Playnas dan lain sebagainya memang kami akan rencanakan akan kita bahas ulang tentang penerbangan itu. Karena sebagai contoh Saudi umroh saja dia ingin tetap menggunakan Saudia, saya kira nanti kita ajak negara-negara lain juga ikut sama-samalah, jangan semua Saudia-Saudia saja gitu ya. Kita tetap membuka kesempatan bagi yang lain, nanti akan kita bahas lebih lanjut tapi lebih bagus memang setelah loby-loby kita jadi lebih sedikit kuat gitu.

Tentang 10 inovasi yang lalu untuk dikaji ulang saya sependapat memang setelah kejadian Covid-19 ini, setelah kejadian protokol kesehatan yang sangat ketat perlu kita kaji kembali tentang 10 inovasi yang lalu kita lakukan. Kalau tidak salah dulu 10 sampai 13 gitu lupa saya.

Tentang kemudian pak Arwan tentang dampaknya, kemudian menyangkut tentang permohonan KUA saya kira saya setuju. KUA ini betul-betul menjadi perhatian kami, terutama juga bukan masalah saja angka perceraian juga menurut informasi meningkat terutama selama Covid-19 ini. Jadi kami betul-betul menggaris bawahi sekali KUA betul-betul melakukan pembinaan itu tidak saja pra pernikahan yang kita sebut *the main* tapi juga selama berumah tangga pun selalu ada kesempatan-kesempatan KUA untuk membuka kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kemenag hadir di Sulbar, Sulbar sudah pernah, saya belum pernah baik kesempatan pertama pasti akan insyaallah saya akan kesana. Dan melihat juga apa-apa yang perlu dilakukan pembenahan.

Pak Marwan Dasopang terima kasih pak pertanggungjawaban keuangan, kemudian tidak membuat *statement* tentang BIPIH saya setuju, kemudian harus segera membuat langkah-langkah alternatif, kebetulan memang kami punya yang namanya pusat krisis haji memang terus menerus mencoba mengkaji terus apalagi yang perlu dilakukan terkait persiapan. Saya kira tadi belum termasuk masalah gelang saya kira, coba gelang juga menjadi pembahasan kita ke depan nanti.

Pak Ace Hasan Syadzily mohon maaf masih bicara tentang gelang tadi, apa kita masih dalam situasi secanggih ini masih 5.0 ini masih pakai gelang gitu. Nanti saya kita bahas lagi, masalah pertanggungjawaban alhamdulillah terima kasih, biaya naik memang bukan tadi kami memang kembali yang lalu mengajukan sebagai saran kepada teman-teman Komisi VIII. Bukan sebuah keputusan yang kami tidak *ngajak-ngajak* Komisi VIII bukan.

Masalah Pak Moekhlas terima kasih, bapak memang kalau bertanya pendek memang itu sesuai dengan marinerinya gitu. Masalah 1 Januari sampai 31 Agustus bukan karena anu pak, tapi memang tahapnya seperti itu gitu ya, harus ini dulu, harus ini dulu dilakukan sehingga akan lama, tapi terima kasih pak. Tentang saldo Rp.1,6 miliar nanti kembali ke BPKH pak, kembali masih ke BPKH. Kemudian tentang haji terbatas saya kira sependapat memang kita tetap harus tingkatkan loby-loby yang ketat kepada Saudi untuk ini gitu. Dan kebetulan kalau saya dengar-dengar memang Menteri Haji Saudi itu agak rajin juga ke Indonesia, tapi kadang-kadang kita terdadak tidak tahu tiba-tiba sudah ada dimana gitu ya, mungkin karena kadang-kadang banyak kesibukan di Saudi dia ingin santai sebentar di Indonesia mungkin seperti itu. Tapi kami monitor dengan ketat itu, usia 18 sampai 50 pak tidak ada, kita tidak bisa *bargaining* tentang ini, tidak bisa mendapat penjelasan kenapa begitu? Pokoknya itu saja keputusannya, gitu tapi saya kira mungkin mereka membuatnya juga berdasarkan evaluasi, ya tentu kejelasannya keselamatan tentu, tapi kenapa ketemu angka 18 dan 50? Saya kira sudah melalui pembahasan yang sangat intens diinternal mereka.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Interupsi Ketua, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Rudi

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Pak Menteri yang saya hormati dan Pak Dirjen, tadikan pak Dirjen memaparkan tentang batas itu tadi yang 18 dan 50, itu logika itu pak. Iyakan mereka mungkin sudah punya data surveinya, kondisi kesehatannya dimasa pandemic ini pak. Kan gitu pak, jadi kita namanya juga bermohon pak Menteri kepada mereka supaya kuota berjalan jamaah jalan, ya alangkah baiknya diterima pak. Jangan dilawan begitu, karena kita tamu kan pak bukan tuan rumah, jangan belagu istilahnya kita tamu gua mau yang 60, 65 lha diusir pak, ya sudah repot lho. Kalau dia mintapun 18 sampai 45 terima saja pak daripada tidak dapat kita kuota gitu. Itu saran saya Pak, terima kasih.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih pak Rudi, seneng juga lihat gaya pak Rudi ini, selamat datang di Komisi VIII.

Tentang jamaah yang diundang ini masalah hanya 100 orang tidak jelas siapa, saya kira betul pak pasti akan menjadi perhatian kita. Jadi tahun depan betul-betul yang kita ajak ini, kita undang betul-betul yang punya kapasitas untuk memanfaatkan apa bahan yang kita sampaikan gitu. Saya kira akan menjadi perhatian kami pak untuk ke depannya, masalah penatar-penatar juga saya kira menjadi perhatian.

Pak Ikhsan Yunus terima kasih kembali masalah gelang tadi saya sudah sepakat, kemudian masalah ekstra kost alhamdulillah tidak ada karena buku sudah sampai ke jamaah, gelang masih di vendor. Kemudian kewajiban-kewajiban PPU 22 November ini apakah sudah dilaksanakan, sudah tapi kembali saya katakan tadi, cuma yang tadinya kami tawarkan asrama haji lha itu belum terpenuhi karena mereka masih sudah ada kontrak dengan hotelnya, tapi ke depan kita akan adakan upaya lagi untuk membuat kemudahan juga. Saya kira kalau kita tawarkan hanya asrama haji saja begitu mungkin nah itu masih tanda tanya, apa ya lebih baik kami di hotel begitu maksudnya. Tapi kalau kita tawarkan kalau diasrama haji anda ongkosnya pasti akan lebih murah, nanti kami bisa bantu apa begitu mudah-mudahan akan lebih baik untuk kita semua. Tapi pastilah kami taati apa yang kita sepakati begitu.

Saya kira itu yang kami sampaikan pak terima kasih banyak atas masukan-masukannya, pasti kami akan memanfaatkan untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan ke depan dalam kaitan tentang khususnya umroh dan haji. Terima kasih pak.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Hadirin yang kami hormati demikianlah jawaban dari saudara Menteri Agama Republik Indonesia selanjutnya selaku Pimpinan rapat saya akan membacakan draf kesimpulan rapat pada hari ini.

F-PG (MUHAMMAD ALI RIDHA).

Pimpinan izin sebentar. Ali Ridho Pimpinan.

KETUA RAPAT:

O iya silakan Pak Ali Ridho.

F-PG (MUHAMMAD ALI RIDHA).

Karena dibatasi di fraksi sudah di wakili oleh bang John hanya ingin menekankan mengenai pak Menteri temuan atau informasi yang kita dapatkan tentang pemalsuan Swab di rombongan umroh yang pertama. Nah itu mesti ada tindakan tegas karena itu menyangkut nama negara, jadi termasuk dalam hal ini Kementerian Agama sehingga itu tolong dipastikan, ditelusuri dan diberi sangsi yang tegas. Itu saja Pimpinan, memang banyak yang ingin dipertanyakan tapi saya menghormati peraturan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Pimpinan eh pimpinan lagi karena kebiasaan jadi Anggota, pak Menteri saya rasa tadi usulan yang sangat baik ya, dan ini harus betul-betul dilaksanakan dan menjadi bagian dari kesepakatan kita bersama disini. Bagi mereka yang berani atau terbukti melakukan pemalsuan Swab itu harus ditindak, baik itu dari PPUnya ya, maupun dari yang bersangkutan. Dan ini kalau perlu memang harus diserahkan kepada pihak penegak hukum, karena ini bukan hal yang main-main, kalau naik pesawat biasa kami pak pergi pulang ke Jambi ada saja yang masuk-masukin tidak teman-temannya pak Ramadhan, kalau itu ya sebetulnya kejahatan juga tapi efeknya tidak terlalu besar begitu. Tapi kalau inikan masalah *pride nation pride* gitu ya harga diri bangsa jadi saya rasa harus ada tindakan tegas supaya tidak terulang kembali.

Baik untuk itu saya izinkan saya untuk membaca draf kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi pak Menteri yang untuk tindakan tadi kita tidak usah masuk kesimpulan pak Menteri ya? tapi sudah komitmen kita bersama ya, baik.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 – 2021
Senin, 23 November 2020.

Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima laporan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi yang realisasinya sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.6.455.264.838,- (89,73%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.194.288.838,-;
2. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia sepakat untuk membahas berbagai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi pada rapat-rapat selanjutnya.

Sebelum ke Anggota kami persilakan dari saudara menteri apakah ada tanggapan atau koreksian dengan draf yang sangat sedikit, *simple* ya mengikuti pak Moekhlas tadi. Drafnya sedikit tapi kerjanya yang banyak pak Menteri, kesimpulannya sedikit.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Mungkin sudah cukup pak cuma, kalau kita tambah sedikit boleh tidak yang poin 2, pada rapat selanjutnya setelah mendapatkan informasi-informasi atau kepastian informasi yang dibutuhkan yang kita butuhkan dari pemerintah Saudi Arabia. Perlu tidak kita tambahkan itu?

KETUA RAPAT:

Ya sepakat saya rasa bagus itu Pak.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Ya tapi bagaimana kalimatnya barangkali.

KETUA RAPAT:

Ya kalimatnya silakan sekretariat. Jadi memang pak Menteri kita biasanya kan setiap tahun itu melakukan Panja BPIH setelah ada MoU. Jadi kalau sudah ada MoU baru kita bisa bergerak, menurut saya titik awalnya, bermulanya pembahasan ini mulai dari MoU itu karena dalam MoU pasti dibahas mengenai kuota, terus pintu kedatangan dan kepulangan, serta penyelesaian administrasi pembiayaan, dulu saya dapat ilmu dari pak Oman mengenai ini.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Informasi, informasi itu perlu ditajamkan sedikit tidak? Setelah mendapatkan informasi yang cukup, atau informasi yang memadai, atau yang kalau mau agak anu apa, oh oke, oke bagus. Cukup pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Cukup pak Menteri. Mungkin dari Anggota ada tambahan, dari meja Pimpinan cukup. Baik, demikianlah draf kesimpulan yang telah kita susun.

Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati.

Sebelum kami menutup rapat kerja pada hari ini, kami persilakan kepada saudara Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan kata akhirnya.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Kembali pak kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VIII atas masukan-masukannya, yakinlah semua masuk pasti akan kami jadikan bahan kami untuk bisa lebih meningkatkan kerja kita bersama dalam mempersiapkan umrah dan haji ini ke depan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian kata akhir yang telah disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Semoga berbagai masukan, pendapat dan pandangan konseptual tersebut dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi yang lebih berkualitas. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita rencanakan dan kita simpulkan mendapat berkah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Demikian acara ini saya tutup dengan membaca hamdalah.

Alhamdulillah rabbil'alamiin
Wallahul muafiq ila aqwamithariq.
Lillahi bisabilil haq fastabiqul qhoirot.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12:40 WIB)

Jakarta, 23 November 2020
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001